



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Pokja Sanitasi Kota Probolinggo berupaya untuk meningkatkan kondisi sanitasi yang lebih baik melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahun 2015 ini Kota Probolinggo salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih untuk melaksanakan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014. Melalui program PPSP tersebut diharapkan Kota Probolinggo dapat lebih meningkatkan dalam pembangunan sektor sanitasi yang dapat melibatkan seluruh stakeholder, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, partisipasi swasta maupun donor serta masyarakat.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kota Probolinggo merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan khususnya sektor sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Probolinggo dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pengembangan layanan sanitasi kabupaten/kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten/kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Kota Probolinggo pada tahun 2010 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi



kabupaten/kota, maka dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang *up to date* dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Probolinggo berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi, berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

- **Aspek Teknis;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, (c) sub sektor drainase lingkungan.
- **Aspek Pendukung;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.

Pembangunan Sanitasi di Kota Probolinggo juga harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kabupaten/kota, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Karena merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi, maka secara struktural dokumen SSK juga merupakan rujukan dari seluruh SKPD dan instansi terkait dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen SSK merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat kabupaten/kota yang meliputi sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). SSK disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan



mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan.

Kota Probolinggo pada tahun 2010 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi kota, maka dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang *up to date* dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran.

Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. SSK Kota Probolinggo merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kota Probolinggo, seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
2. SSK Kota Probolinggo merupakan penjabaran secara lengkap sebagian dari RPIJM tahun 2014 – 2019 khususnya dalam bidang sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase);
3. SSK Kota Probolinggo akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD untuk kepala daerah (2014 – 2019);
4. Penyusunan SSK Kota Probolinggo mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW tahun 2009 – 2028) Kota Probolinggo, khususnya berkaitan dengan zonasi pembangunan sarana sanitasi.

Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

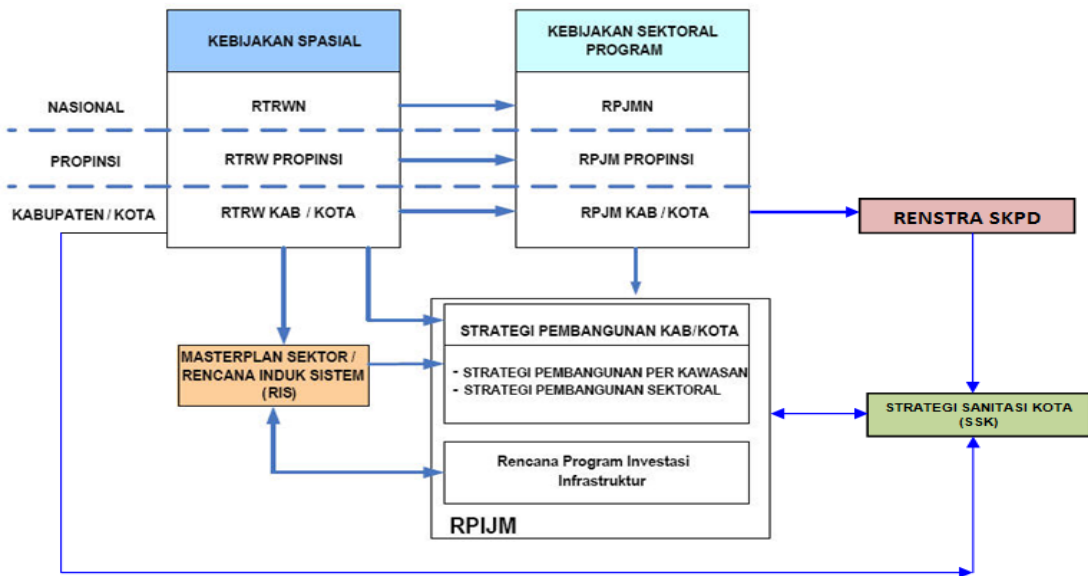
- ✓ Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
- ✓ Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.
- ✓ Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019.

Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah.



Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Probolinggo tahun 2015 periode pelaksanaan 2016-2020 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai *universal access*. Untuk memastikan dokumen Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Kota Probolinggo seperti RTRW, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Keterkaitan dokumen SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD. SSK pemutakhiran menjadi dokumen yang mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW, RPJMD khusus sektor sanitasi serta bisa memberi masukan umpan balik (*feed-back*) dan melengkapi penyusunan RPJMD pada periode berikutnya. Dokumen SSK pemutakhiran bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan RPI2JM untuk sektor sanitasi. yang digambarkan pada bagan berikut ini.



Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber :



1.2. Metodologi Penyusunan

Strategi Sanitasi Kota Probolinggo ini disusun oleh Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kota Probolinggo dibantu Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Timur dan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS melalui *Provincial Sanitation Development Advisor* (ProSDA) dan *City Facilitator* (CF). Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama-sama dengan tim Pokja Sanitasi Kota Probolinggo melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan.

Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Data

1) Data Sekunder, melalui:

- Pengumpulan data dan dokumen dari masing-masing SKPD yang terkait, baik langsung atau tidak langsung seperti data statistik, laporan, tabel, foto dan peta.
- Narasumber, baik dari instansi pemerintah yang terkait, pihak swasta, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil.

2) Data Primer, melalui :

- Survey studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment* = EHRA) dengan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat.
- Studi Kajian Spesifik (Studi Keuangan dan Kelembagaan, Studi SSA (Supply Sanitation Assesment), Studi media dan Komunikasi, Studi PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dan Studi Sanitasi Sekolah) dan dari Buku BPS, SSK dan MPSS tahun 2010-2014.



b. Pengumpulan Data

- 1) Studi literatur dan data sekunder
- 2) Melakukan observasi dan wawancara responden
- 3) FGD (*Focus Group Discussion*)

c. Analisa Data

Beberapa analisa data yang dilakukan :

- 1) Analisa data EHRA yang sumber datanya dari survey EHRA. Output dari analisa ini adalah IRS (Indeks Resiko Sanitasi)
 - 2) Analisa instrumen profil sanitasi yang menghasilkan peta area beresiko untuk 3 komponen (air limbah domestic, persampahan, drainase) dan zona dan system untuk ketiga komponen tersebut.
 - 3) Analisa instrument perencanaan yang menghasilkan perkiraan biaya dan volume system dan teknologi yang dipilih untuk komponen air limbah domestik, persampahan, drainase.
- d. Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahun). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, Peluang dan tantangan dan Penentuan Zona Sanitasi.
- e. Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Melakukan kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada stakeholder terkait di tingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat.
- 2) Membangun kesepahaman dan dukungan terhadap program, kegiatan dan pendanaan pembangunan sanitasi dari berbagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan sanitasi di daerah.

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran.



- 2) Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3) Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat.
 - 4) Tersusunnya deskripsi program/kegiatan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap).
 - 5) Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya.
 - 6) Teridentifikasi program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap).
- f. Review dokumen SSK yang disusun pada periode sebelumnya
- Melakukan review pada data-data hasil kajian dan program kegiatan yang telah direalisasikan dari dokumen SSK awal selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dan strategi untuk mencapai target *universal access* layanan layak sanitasi.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan strategi sanitasi kota (SSK) Kota Probolinggo adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan .
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota.
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
2. Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
3. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.



4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Menteri Kesehatan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.



2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

Perda dan Keputusan Gubernur Jawa Timur

1. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional.
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit.
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan.
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung;



3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang AMDAL;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2014-2019.
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Master Plan Drainase Kota Probolinggo.
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Kota Probolinggo.
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 ;
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 tahun 2010 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.



2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kaku.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

1.4. Sistematika Penulisan

Seusai dengan pedoman pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:



Bab-1 Pendahuluan

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Bab-2 Profil Wilayah dan Sanitasi Saat ini

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kota Probolinggo, kemajuan pelaksanaan SSK tahun 2010 – 2014 yang lalu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen profil dan peta area berisiko sanitasi.

Bab-3 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Merupakan arah pengembangan sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; visi dan misi sanitasi Kota Probolinggo, pentahapan pengembangan sanitasi sesuai dengan zona dan sistem sanitasi yang direkomendasikan serta analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kota Probolinggo.

Bab-4 Strategi Pengembangan Sanitasi

Memuat strategi pengembangan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan darinase perkotaan berdasarkan hasil analisis SWOT.

Bab-5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Menyajikan tentang ringkasan program dan anggaran, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi *funding gap*.

Bab-6 Monitoring dan Evakuasi Capaian SSK

Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK.